

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA-AS

2.1 Hubungan Indonesia-AS Sebelum Insiden Santa Cruz

Kedekatan hubungan Indonesia-AS dimulai sejak tahun 1949 dimana bukti dari adanya kedekatan tersebut adalah pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Jalinan hubungan Indonesia-AS merupakan sebuah kerjasama yang dilandasi atas beberapa nilai persamaan kedua negara, yaitu penegakan demokrasi, menghormati hak-hak asasi manusia, *good governance*, dan keberadaan masyarakat yang pluran dan saling bertoleransi. Di masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami banyak permasalahan khususnya pada bidang perekonomian. Inflasi pada masa demokrasi terpimpin menyebabkan keadaan Indonesia yang tidak stabil. Indonesia yang menerapkan kebijakan politik bebas aktifnya menjadi latar belakang Soekarno bekerjasama dengan AS untuk melakukan impor beras yang dituangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan pada 5 November 1960 dalam judul “*Agricultural Commodities Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Under Title-1 of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 as Amended*”. Setelah melakukan perjanjian tersebut, AS memberikan bantuan sebesar 16 juta dollar (Amalia & Liana, 2018).

Beberapa kerjasama yang dilaksanakan oleh Indonesia-AS di masa kepemimpinan Soekarno, khususnya dalam bidang perekonomian yaitu pertama, pemberian pinjaman SAC pada 5 November 1960 yang direalisasikan dalam proyek jatiluhur, padi contra, perbaikan dan perluasan stasiun pembibitan,

penimbunan pupuk, dan pusat penimbunan padi. Kedua, pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan pada 26 Oktober 1961 dimana AS memberikan tawaran untuk mengirimkan barang surplus hasil pertanian yang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Ketiga, pada tanggal 7 Januari 1964, Indonesia menerima kiriman dari AS dalam bentuk beras dan kapas (Amalia & Liana, 2018).

Walaupun pada masa demokrasi terpimpin Indonesia telah menjalin kerjasama dengan AS, jalinan hubungan Indonesia-AS semakin erat di masa kepemimpinan Soeharto (orde baru). Eratnya hubungan antara Soeharto dan AS dilatarbelakangi oleh adanya persepsi antara Indonesia-AS untuk membendung pengaruh komunis. Disamping itu, Indonesia memiliki anggapan bahwa pentingnya investasi dan modal asing untuk memajukan perekonomian Indonesia (Ghifari, 2019).

Beberapa bantuan yang diberikan oleh AS kepada Indonesia pada masa orde baru yaitu pertama, adanya penanaman modal yang diberikan oleh AS untuk membangun perekonomian Indonesia. Investasi tersebut dituangkan dalam PT Freeport sejak tahun 1968 yang ditandatangani dengan Kontrak Karya I. Kontrak investasi AS dengan melalui PT Freeport dilaksanakan dengan kurun waktu 30 tahun. Penanaman saham PT Freeport memberikan keuntungan yang cukup besar sehingga Indonesia dapat meningkatkan perekonomian khususnya bangsa Indonesia (Setia, 2023).

Kedua, AS-Indonesia juga bekerjasama dalam bidang kesehatan. AS mengirimkan bantuan dengan mengirimkan tim kesehatan United States Public Health (USPH) yang ditujukan untuk menangani wabah pes di Boyolali

(Zubaidah, Pratiwi, & Fauzi, 2021).

Ketiga, AS membantu Indonesia dalam pengembangan program kesehatan dan memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah program pemberantasan penyakit menular. AS membantu Indonesia dalam memberantas penyakit menular seperti cacar, polio, dan campak. Bantuan ini meliputi penyediaan vaksin, pelatihan tenaga kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan penyakit menular. Bantuan dari Amerika Serikat untuk program pemberantasan penyakit menular dimulai pada tahun 1950 (Direktorat Jenderal PP & PL, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007).

Keempat, kerjasama Indonesia-AS dalam bidang pertahanan di masa orde baru juga berjalan dengan baik. Eratnya hubungan antara AS-Indonesia ditandai dengan dukungan yang diberikan oleh AS kepada Indonesia untuk melakukan invasi kepada Timor-Timur di tahun 1975. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan pendanaan sejak tahun 1975 hingga 1985 dengan jumlah \$1,119,9 (Ervin A. F., 2022).

Kelima, Indonesia dan AS memiliki kerjasama yang erat dalam bidang pendidikan. Contohnya, AS membantu Indonesia dalam pengembangan program beasiswa dan memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan pendidikan di Indonesia. Terdapat program Fulbright yaitu program beasiswa bergengsi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas ternama di Amerika Serikat. Program ini dimulai pada tahun 1952 (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, 2022).

Pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia cenderung menghindari hutang dengan luar negeri. Namun sebaliknya, di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia membutuhkan bantuan luar negeri untuk pembangunan di Indonesia. Bantuan diberikan oleh IGGI dan IMF. Adanya pinjaman keuangan yang diberikan oleh Amerika Serikat menyebabkan Indonesia mendapatkan julukan “*Good Boy*” Amerika Serikat dikarenakan Indonesia selalu mengikuti seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Adanya pinjaman yang diambil menjadikan Indonesia sebagai negara yang terjebak dengan hutang dan mempengaruhi kebijakan yang diambil. Dengan adanya kebijakan hutang yang diberikan oleh IMF, maka Indonesia akan terus menjadi “*Good Boy*” AS dikarenakan adanya ketergantungan kepada negara maju akan memberikan keputusan yang harus dipatuhi oleh negara berkembang sehingga negara maju bersikap mengeksploitasi secara sepihak dari adanya jebakan hutang yang diberikan kepada negara berkembang (Harthanti & Nuryana, 2018).

Jalanan kedekatan hubungan antara Indonesia-AS masa orde baru berakhir di tahun 1991 dikarenakan adanya kasus penembakan yang dilakukan oleh TNI terhadap demonstran di Timor-Timur sehingga hal ini memberikan anggapan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia mengakibatkan renggangnya dalam hubungan AS-Indonesia khususnya dalam bidang militer. Tindakan yang dilakukan oleh AS tidak terlepas dari adanya tekanan dari pihak PBB sehingga AS mengambil keputusan untuk mengembargo Indonesia (Ervin A. F., 2022).

2.2 Timor Timur dan Insiden Santa Cruz

Timor Timur merupakan sebuah negara bekas jajahan Portugis sejak abad ke-16. Keberadaan Revolusi Bunga di tahun 1974 memberikan dampak yang cukup positif bagi Timor Timur, yaitu Timor Timur diberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Adanya hal ini menyebabkan berkembangnya elit-elit Timor Timur mendirikan beragam himpunan yaitu “*Uniao Democratica Timorese*” (UDT), “*Klibur Oan Timor Aswain*” (KOTA), “*Asosiacao Popular Democratica Timorese*” (APODETI), dan “*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*” (FRETELIN). Frenteli merupakan salah satu partai yang bergerak secara revolusioner dan radikal untuk mencapai kemerdekaan Timor Timur. Beberapa partai yaitu UDT, KOTA, dan Apodeti meyakini bahwa Timor Timur perlu berintegrasi dengan Indonesia untuk mengatasi pergerakan Frentelin yang semakin masif. Sehingga, pada 30 November 1975 dihasilkan Perjanjian Balibo yang memiliki inti bahwa Timor Timur telah masuk menjadi wilayah Indonesia yang tertuang dalam UU No. 76 Tahun 1976 dimana Timor Timur telah menjadi wilayah provinsi Indonesia ke-27 (Suartika, 2015).

Sebelum menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia, terdapat beberapa operasi yang dilaksanakan untuk menghentikan kekuatan Fretilin yang dapat memicu perang saudara. Operasi tersebut dilanjutkan dengan adanya operasi Flamboyan yang dilaksanakan dengan menempatkan TNI di kawasan Timor Timur. Setelah adanya operasi Flamboyan, misi Indonesia selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan Fretilin yang berkembang pesat di Dili dan Bacau. Sejak tahun 1975, Timor Timur telah melaksanakan tiga bentuk operasi di

Timor Timur, operasi tersebut meliputi operasi tempur, territorial, dan intelejen (Arifianto A. , 2016).

Namun, setelah disahkan menjadi bagian dari Indonesia, terdapat konflik baru dimana banyaknya pendatang Indonesia menuju ke Timor Timur untuk mencari lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat asli Timor Timur banyak yang mengalami pengangguran sedangkan pendatang telah mendapatkan pekerjaan yang cukup layak. Banyaknya pendatang ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara pendatang dan masyarakat asli Timor Timur. Permasalahan sosial dan ekonomi dimanfaatkan oleh partai Fretilin untuk menggerakkan masa dalam tuntutan kemerdekaan Timor Timur yang dilakukan dengan langkah melangsungkan demonstrasi (Arifianto A. , 2016).

Pada tanggal 12 November 1991, tepatnya berlokasi di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur terjadi sebuah insiden penembakan masal yang dilakukan kepada demonstran dengan tuntutan untuk memerdekakan Timor Timur. Pembantaian tersebut menyebabkan korban jiwa kurang lebih ratusan korban meninggal dunia dalam insiden berdarah ini (Islam & Febrian, 2021). Insiden yang terjadi di pemakaman Santa Cruz merupakan salah satu dari pelanggaran HAM berat dikarenakan sudah termasuk ke dalam bagian dari tindakan genosida di Timor Timur (Adryamarthanino & Nailufar, 2021).

Sebelum terjadinya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh militer Indonesia, tepat sebulan sebelum insiden tersebut yaitu Oktober 1991, delegasi dari Palemen Portugal dan 12 wartawan mendapatkan mandat untuk melaksanakan kunjungan di Timor Timur. Kunjungan tersebut telah disambut

antusias oleh mahasiswa Timor Timur. Namun sayangnya, rencana penyambutan terhadap delegasi dan wartawan Portugal di Timor Timur ditolak oleh pemerintah Indonesia dimana pada saat itu alasan Indonesia menolak adanya kunjungan yang dilakukan oleh Jill Joleffe (wartawan Australia) yang mendapatkan stigma dalam memberikan dukungan gerakan kemerdekaan Fretilin (Hyland, 1991).

Penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi latar belakang kekecewaan mahasiswa yang telah antusias untuk menyambut delegasi Portugal dan wartawan. Alasan lain yang menjadikan mahasiswa Timor Timur kecewa adalah dikarenakan mahasiswa telah mempersiapkan diri dalam mengangkat isu-isu untuk kemerdekaan dan perjuangan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis pro-kemerdekaan. Tidak tertahannya kekecewaan masyarakat Timor Timur terhadap pemerintah Indonesia menjadi latar belakang kuat adanya perseteruan antara Indonesia dan mahasiswa Timor Timur sehingga menyebabkan puncak kemarahan mahasiswa terjadi pada 28 Oktober 1991.

Sebelumnya juga terjadi konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan dimana pertemuan antara dua kelompok tersebut dilaksanakan di Gereja Motael, Dili. Perseteruan yang tidak mendapatkan titik temu menyebabkan tewasnya Afonso Henriques yang berasal dari pihak kelompok pro-integrasi. Tewasnya Afonso Henriques disebabkan oleh perkelahian. Disamping itu, dari kelompok pro-kemerdekaan yaitu Sebastiao Gomes juga menjadi korban yang tewas karena penembakan tentara ABRI (Marpaun, 2009).

Di saat situasi memanas antara demonstran Timor Timur dengan tentara Indoensia, peristiwa berdarah tersebut berlangsung dimana beberapa mayor dan demonstran, yaitu Geerhan Lantara tewas dengan cara ditusuk. Pengakuan dari pihak demonstran, Stahl yang memberikan penjelasan bahwa Lantara melakukan penyerangan terhadap demonstran termasuk di dalam peristiwa tersebut Lantara juga melakukan penyerangan kepada seorang anak perempuan yang mengibarkan bendera Timor Timur pada saat demonstrasi berlangsung. Pengakuan yang sama juga diberikan oleh aktivis Fretilin, Constancio Pinto yang memberikan penjelasan bahwa tentara dan polisi Indonesia melakukan pemukulan terhadap demonstran (Kubiak, 1995).

Di saat demonstran melakukan iring-iringan menuju pemakaman umum, pihak Indonesia telah mengerahkan 200 tentara yang mengacungkan senjata untuk menghalau demonstran tersebut. Namun sayangnya, senjata yang ditenteng oleh tentara tidak hanya menjadi sebuah simbol ancaman, namun senjata tersebut dilepaskan secara nyata pada saat demonstran memasuki area pemakaman Santa Cruz (Carey, 1995). Dampak dari tembakan brutal yang dilakukan oleh militer Indonesia tersebut adalah menewaskan ratusan masyarakat Timor Timur yang melakukan demonstrasi kemerdekaan (Roberge, Park, & Klassen, 2023).

Pembantaian yang berlangsung di Dili, Timor Timur disaksikan langsung oleh dua jurnalis yang berasal dari AS, yaitu Amy Goodman dan Allan Nairn. Peristiwa berdarah tersebut diliput secara diam-diam oleh Max Stahl dan ditayangkan di *Yorkshire Television*, Inggris. Pada saat Stahl merekam kondisi di kawasan pemakaman umum Santa Cruz, jurnalis AS yaitu Goodman dan Nairn

mencoba untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Timor Timur dengan berdiri di garda terdepan antara demonstran dan militer Indonesia. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan oleh kedua jurnalis AS tersebut memantik kemarahan tentara sehingga Goodman menerima pukulan dari tentara Indonesia. Sedangkan Nairn yang berusaha untuk melindungi rekannya dipukul dengan senapan oleh tentara sehingga mengalami keretakan pada tengkoraknya retak (Goodman & Nairn, 2008).

Pada saat militer Indonesia dan demonstran sedang memanas, militer Indonesia juga berusaha mencegah para wartawan dan jurnalis meliput insiden berdarah tersebut. Namun sayangnya, usaha yang dilakukan oleh militer Indonesia tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa juru kamera yang berhasil dalam menyelundupkan pita video yang dikirimkan kepada pihak Australia. Pita video tersebut diberikan kepada Saskia Kouwenberg, seorang wartawan yang berasal dari Belanda. Hasil dari video yang dikirimkan tersebut menjadi bukti kuat bahwa pihak Indonesia telah melakukan kekerasan tidak hanya terhadap demonstran, namun juga telah melanggar kode etik yaitu penyerangan terhadap jurnalis. Hasil rekaman yang dilakukan oleh jurnalis ditayangkan dalam film dokumenter dalam *First Tuesday* berjudul "*In Cold Blood: The Massacre of East Timor*" di ITV, Inggris pada Januari 1992 (ITN, 2013). Bukti kuat yang ditayangkan di beberapa video dokumenter serta kesaksian dari jurnalis yang menerima kekerasan militer Indonesia menyebabkan Indonesia menerima respon negatif dari seluruh dunia (Manan, 2008).

Pemerintah Indonesia membantah tuduhan bahwa militer Indonesia telah melakukan tindakan genosida. Indonesia memberikan alasan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia merupakan reaksi spontan untuk melindungi diri dalam menghadapi demonstran (International, Amnesty, 1991). Namun, pernyataan Indonesia tersebut dibantah oleh beberapa pihak internasional dengan alasan bahwa tentara Indonesia telah melakukan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan tidak hanya dilakukan pada satu titik. Beberapa tempat yang dimaksudkan adalah Quelicai, Lacluta, dan Kraras (Carey, 1995).

Setelah adanya kritik internasional, politikus sekaligus perwira ABRI yaitu Tri Sutrisno yang memberikan pernyataan berisikan “tentara tidak dapat diremehkan. Tindakan terakhir yang dapat kami lakukan adalah melakukan penembakan. Perusuh yang menyebabkan kerusuhan harus ditembak. Sehingga penembakan yang kami lakukan memang benar adanya”. Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah mengakui telah melakukan penembakan terhadap demonstran di pemakaman umum Santa Cruz, Dili, Timor Timur (Blau, 2005).

Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia di Timor Timur menyebabkan reaksi negatif dari dunia internasional. Tentunya, hal ini juga berdampak terhadap politik Indonesia untuk bangkit pasca Perang Dingin di tahun 1990-an. Selama beberapa tahun, Indonesia menjadi negara yang selalu disalahkan atas penembakan di Santa Cruz, Dili. Rekaman terus menerus disebarkan sehingga masyarakat Indonesia dapat melihat tindakan militer Indonesia yang ditutupi oleh pemerintah Indonesia pada saat melakukan penyerangan yang berdampak pada

penewasan ratusan masyarakat Timor Timur (Vickers, 2005). Tekanan internasional menyebabkan beberapa kelompok mahasiswa yang pro-demokrasi dan pers mahasiswa mulai mengangkat isu-isu yang tidak hanya melakukan kritik terhadap insiden penembakan demonstran Timor Timur, namun juga telah merambah untuk mengkritisi kemerdekaan Timor Timur (Vickers, 2005).

Pembantaian yang dilakukan oleh militer Indonesia meninggalkan citra buruk bagi Indonesia di dunia internasional. Insiden pembantaian Santa Cruz menjadi bukti valid bahwa Indonesia menggunakan kekerasan kepada demonstran Timor Timur yang berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Tentunya, insiden berdarah yang menyebabkan tewasnya 250 demonstran meninggalkan trauma bagi masyarakat Timor Timur dan juga memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam menangani hak asasi manusia (Kuntari, 2008).

2.3 Hubungan Indonesia-AS Setelah Insiden Santa Cruz

Adanya peristiwa Santa Cruz menyebabkan Indonesia menjadi sorotan media asing dan menyebabkan AS mengambil langkah diplomasi koersif yang digunakan untuk menangani Insiden Santa Cruz di Timor Timur. AS melakukan ancaman untuk melakukan embargo militer kepada Indonesia yang telah melanggar nilai-nilai HAM dalam skala berat. HAM dalam skala berat yang dimaksud adalah tentara Indonesia menembaki ratusan pengunjukrasa pro-kemerdekaan Timor Timur. Insiden itu mengakibatkan ratusan orang meninggal dan luka-luka (Nardiman, 2022).

Akibat kejadian tersebut, hubungan kerjasama Indonesia dengan AS merenggang terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pasca insiden Santa Cruz pada tahun 1995, AS mengembargo Indonesia. Embargo tersebut merupakan embargo militer. Embargo yang dilakukan oleh AS kepada Indonesia merupakan sebuah sanksi yang digunakan oleh AS dalam persenjataan militer Indonesia. Embargo yang dilakukan oleh AS berupa larangan terkait dengan bantuan pasokan persenjataan militer dan ekspor-impor alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) (Lubis I. R., 2022).

Merenggangnya hubungan Kerjasama antara Indonesia dengan AS memiliki dampak yang cukup signifikan yaitu Indonesia tidak dapat memenuhi pasokan persenjataan dan juga suku cadang militernya. Hal ini menyebabkan pasukan militer Indonesia mengalami penurunan persiapan dalam menghadapi pertempuran dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Selain itu, banyak alutsista dan perlengkapan militer lainnya using akibat embargo yang dilakukan oleh AS. Dalam proses embargonya, AS tidak hanya menghentikan pasokan persenjataan militernya kepada Indonesia, namun juga memberlakukan IMET Ban (*International Military Education and Training Banned*) yaitu pemberhentian program latihan gabungan antara Indonesia-AS 1992 hingga 2005 (Arifanto & Zulkarnain, 2016).

Indonesia merupakan negara yang banyak membeli persenjataan serta kerjasama pelatihan dengan AS, menjadikan Indonesia mampu untuk memikirkan sebuah langkah-langkah yang digunakan dalam menangani proses embargo yang dilaksanakan oleh AS (Hikmawati, 2023). Dengan keberadaan langkah-langkah

yang digunakan oleh Indonesia dalam menangani pemberhentian pasokan AS kepada Indonesia ini, menjadikan Indonesia melaksanakan jalinan kerjasama dengan negara-negara lain (tidak berpusat kepada bantuan AS lagi). Hal tersebut disebabkan apabila Indonesia tidak melakukan langkah penanganan, Indonesia memiliki resiko kurangnya pasokan alutsista untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terdapat data kerjasama Indonesia dengan negara lain pada saat di embargo oleh AS yang terlampir pada lampiran 1. Hubungan kedua negara khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan jauh dari kata sempurna. AS tidak lagi mengirimkan perlengkapan militer kepada Indonesia. Penghentian pengiriman tersebut terjadi selama 10 tahun (1995-2005).

2.4 Pencabutan Embargo AS Terhadap Indonesia

Pada tanggal 12 Oktober 2002 Indonesia mengalami peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok teroris tepatnya di Bali I dan II. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati yang membuat kebijakan UU No. 16 Tahun 2003 dan memberlakukan Perpu No. 1 Tahun 2002 dimana kebijakan tersebut ditujukan untuk memberantas korupsi. Tidak hanya kebijakan tersebut, Megawati juga memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani permasalahan negara terkait tindak pidana terorisme (Thoyibi, 2008). AS memiliki agenda yang disebut dengan “*War on Terror*” merupakan sebuah momentum yang tepat bagi Indonesia dan AS untuk melaksanakan kerjasama yang bergerak untuk melawan terorisme.

Sebelum terjadi insiden Bom Bali I dan II, Megawati telah melaksanakan kunjungan ke AS pada tanggal 19 September dimana dalam pertemuan tersebut mendapatkan hasil bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan AS dalam rangka memberantas terorisme. Kunjungan yang dilaksanakan oleh Megawati mendapatkan respon positif dari pihak AS dimana AS memberikan beberapa rencana yang akan dilaksanakan oleh AS kepada Indonesia. Rencana tersebut adalah rencana memperbarui kerjasama militer yang sempat diembargo, mencabut embargo AS kepada Indonesia, dan membentuk dialog keamanan antara Indonesia dan AS (Sukma, 2003).

Kerjasama antara Indonesia-AS menghasilkan kerjasama dalam bentuk program yang diluncurkan oleh AS yaitu *Anti-Terrorism Assistance* (ATA) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan Indonesia dalam menangani tindak pidana terorisme. Program yang dikeluarkan oleh AS tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan oleh AS kepada Indonesia dalam bentuk bantuan dana \$3,5 juta yang dilaksanakan pada tahun 2003 dimana target pemberian dana tersebut dialokasikan untuk membangun fasilitas yang digunakan dalam pelatihan militer (Kusuma, 2019). Walaupun dalam menangani teroris Bush dan Megawati memiliki pandangan yang berbeda, dimana Bush berfokus pada kebijakan untuk menangani dalam skala internasional sedangkan Megawati berfokus untuk menangani terorisme dalam negeri. Namun hal tersebut tidak menghalangi kedua pemimpin negara dalam memberantas terorisme (Matondang, 2016).

Setelah berakhirnya pemerintahan Megawati yang digantikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut dengan SBY). Pada masa pemerintahan SBY, kerjasama antara Indonesia-AS mengalami peningkatan kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan. Eratnya kerjasama antara Indonesia-AS dilatarbelakangi oleh persamaan perspektif kedua negara dalam menyadari bahwa tindakan teroris dapat memberikan ancaman terhadap keselamatan dan kedaulatan bangsa (Sukadis, 2018).

Banyaknya peristiwa pengeboman yang terjadi sejak masa awal pemerintahan SBY merupakan sebuah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memberikan bukti kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah memiliki kesungguhan dalam menangani terorisme. Masa pemerintahan SBY juga memberikan pelurusan kepada pandangan dunia internasional bahwa terorisme tidak termasuk dalam atribut agama (Islam), namun terorisme merupakan sebuah musuh masyarakat. Untuk meluruskan hal tersebut, SBY memberikan tawaran kepada pihak AS untuk melaksanakan dialog dengan tokoh Islam sehingga pandangan bahwa teroris berasal dari agama Islam dapat dihilangkan.

Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia juga telah berusaha untuk mempererat hubungan kerjasama bilateral khususnya dengan negara Barat sebagai negara yang memiliki banyak pengaruh bagi politik internasional (Hidayat, 2018). Presiden SBY fokus kepada memperbaiki dan memperkuat hubungan AS dengan Indonesia. Presiden SBY menyadari Indonesia harus tetap menjaga hubungan dengan AS, maka dari itu melalui motto Presiden “*million friends zero enemy*”,

SBY berusaha meminimalisir konflik dengan seluruh negara, utamanya AS sebagai negara adidaya dan paling berpengaruh di dunia (Ghifari, 2019).

SBY melaksanakan kunjungan ke AS pada tahun 2005 dimana kunjungan tersebut ditujukan untuk membahas kerjasama antar kedua negara tersebut. Pertemuan yang dilaksanakan oleh SBY-Bush menghasilkan hasil positif yaitu kedua negara bersepakat untuk mempererat kerjasama pada bidang keamanan khususnya dalam bidang terorisme. Komitmen kerjasama tersebut ditunjukkan oleh Bush yang menormalisasikan kerjasama militer dengan Indonesia yang sempat terhenti dikarenakan insiden Santa Cruz (Sukadis, 2018).

Di masa pemerintahan SBY ini pula, terdapat sebuah momentum yang sangat dinantikan oleh Indonesia, khususnya dalam bidang militer yaitu pada tahun 2005 embargo militer resmi dicabut oleh AS. Tentunya, pencabutan embargo militer yang dilakukan oleh AS memberikan dampak positif khususnya dalam normalisasi hubungan antara AS-Indonesia (Hidayat, 2018). Pencabutan embargo tersebut membuat hubungan dan kerjasama Indonesia-AS kembali pulih dan semakin membaik. Indonesia mulai mengimpor kembali perlengkapan senjata dari AS. Namun, di balik kembalinya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS terdapat beberapa alasan dan pertimbangan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Penjelasan mengenai alasan di balik kembalinya kerjasama, akan dibahas pada bab berikutnya.